

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pemerintahan daerah di Indonesia merupakan seperangkat norma, prinsip, dan mekanisme yang mengatur pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 beserta regulasi turunannya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hukum ini mencakup pengaturan mengenai pembentukan pemerintahan daerah, kewenangan legislatif dan eksekutif, hubungan antara pusat dan daerah, serta pengelolaan keuangan dan pelayanan publik untuk memastikan *responsivitas* pemerintah daerah terhadap kebutuhan lokal, peningkatan pelayanan publik, serta keselarasan pembangunan. Sebaliknya, lemahnya implementasi dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan ketimpangan wilayah.¹

Penanggulangan bencana di Indonesia merupakan salah satu prioritas utama dalam kebijakan publik, baik di tingkat nasional maupun daerah, seiring dengan terbentuknya kerangka hukum yang mengatur tata kelola penanganan bencana, termasuk keberlakuan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Bencana di tingkat kabupaten.² Implementasi peraturan daerah tersebut memiliki relevansi yang signifikan bagi wilayah pesisir seperti Kabupaten Indramayu, mengingat fenomena banjir rob telah menjadi kejadian berulang yang menimbulkan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat, khususnya di Desa Eretan Wetan.

Secara normatif, keberadaan peraturan daerah ini diharapkan dapat menciptakan sinergi antara kegiatan mitigasi, penanganan darurat, serta

¹ Dina Susiani, *Hukum Pemerintahan Daerah*, ed Tahta Media, 1st ed. (Surabaya: Tahta Media Group, 2025). 31

² Setda Kabupaten Indramayu, "Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Kabupaten Indramayu" (2016).

rehabilitasi pascabencana melalui koordinasi lintas instansi dan disertai dengan partisipasi aktif masyarakat.³

Namun demikian, realitas empiris menunjukkan masih terdapat sejumlah kendala dalam pelaksanaannya, antara lain kurangnya koordinasi antarlembaga, keterbatasan sumber daya anggaran, serta rendahnya keterlibatan komunitas lokal dalam pengelolaan bencana, khususnya pada kasus banjir rob di kawasan pesisir Indramayu.⁴

Fenomena banjir rob yang bersifat kronis tersebut mendorong perlunya evaluasi terhadap pelaksanaan dan efektivitas Peraturan Daerah, termasuk bagaimana regulasi ini diinterpretasikan, diimplementasikan, serta diadaptasikan dengan konteks sosial dan geografis Desa Eretan Wetan. Selain itu, penting pula untuk meninjau posisi dan peran desa dalam perspektif fikih *siyasah* guna memperkuat legitimasi kebijakan publik serta meningkatkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berkeadilan di tingkat lokal.⁵

Rumusan masalah dalam penelitian ini secara khusus diarahkan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 oleh Pemerintah Kabupaten Indramayu dalam penanggulangan bencana banjir rob; mengidentifikasi beragam kendala yang dihadapi dalam penerapan regulasi tersebut di tingkat kabupaten terhadap fenomena banjir rob di Desa Eretan Wetan; serta menelaah bentuk dukungan dan peran Desa Eretan Wetan dalam mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah berdasarkan perspektif fikih *siyasah*. Identifikasi permasalahan ini menjadi dasar untuk memusatkan analisis pada tiga aspek utama, yaitu:⁶

³ Anwar Sadat, "Intergovernmental Dalam Penanganan Bencana Alam Di Pemerintahan Daerah," *Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan* 4, no. 1 (2019): 66–81.

⁴ Annisa Rengganis, "Aksi Dan Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kuningan Pada Tahap Mitigasi Bencana," *SOSFILKOM: Jurnal Sosial, Filsafat Dan Komunikasi* 14, no. 01 (2020): 1–8.

⁵ Ellectrananda Anugerah Ash-Shidiqqi, "Alternatif Strategi Pembiayaan Asuransi Bencana Alam Di Indonesia," *Journal of Governance and Policy Innovation* 1, no. 2 (2021): 14–22.

⁶ Nurul Fajriah, Sutopo Patria Jati, and Yuliani Setyaningsih, "Analisis Komitmen Manajemen Rumah Sakit Terhadap Kesiapsiagaan Dalam Menghadapi Bencana Di RSUD Indramayu," *Jurnal Ilmiah Kesehatan* 21, no. 1 (2022): 4–11.

- a) Tingkat efektivitas mekanisme implementasi Peraturan Daerah di tingkat kabupaten dalam konteks pengelolaan bencana banjir rob;
- b) Hambatan-hambatan yang bersifat struktural, kebijakan, sumber daya, dan budaya organisasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah di wilayah pesisir; serta
- c) Peran desa sebagai aktor strategis dalam operasionalisasi kebijakan publik, termasuk bagaimana nilai-nilai fikih *siyasah* seperti *mashlahah* (kemaslahatan), *syura* (musyawarah), *‘adl* (keadilan), dan tata kelola komunitas diterapkan dalam praktik dukungan terhadap kebijakan publik di Desa Eretan Wetan.

Penelitian ini memiliki relevansi akademik, kebijakan publik, dan praktis yang signifikan. Dari sisi akademik, studi ini berkontribusi dalam mengisi kekosongan literatur empiris mengenai implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Bencana di tingkat kabupaten, dengan fokus pada studi kasus desa pesisir yang menghadapi fenomena banjir rob sebagai isu berulang dan berdampak luas. Dalam konteks kebijakan publik, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan strategis bagi pemerintah daerah dalam memperkuat sinkronisasi antara peraturan daerah, instrumen teknis pelaksanaan, serta alokasi sumber daya yang memadai. Dengan demikian, respons kebijakan terhadap bencana, khususnya di wilayah pesisir, dapat menjadi lebih proaktif, terukur, dan berkelanjutan, sejalan dengan tantangan perubahan iklim dan dinamika sosial-ekologis masyarakat pesisir.⁷

Secara praktis, penelitian ini menyoroti peran strategis Desa Eretan Wetan sebagai unit pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, yang memiliki posisi penting dalam mendorong partisipasi publik, memperkuat akuntabilitas, serta meningkatkan legitimasi kebijakan melalui penerapan prinsip-prinsip dalam kerangka fikih *siyasah*. Dengan demikian, rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini diharapkan dapat

⁷ Trisna Rudy, "Penerapan Manajemen Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Terhadap Korban Bencana Alam Banjir Di Kabupaten Pati," *Sanskara Manajemen Dan Bisnis* 2, no. 02 (2024): 79–83.

memberikan kontribusi yang relevan dan aplikatif bagi pemerintah daerah maupun pemerintah desa dalam upaya memperkuat sinergi antara kebijakan publik dan nilai-nilai keagamaan, khususnya dalam konteks penanggulangan bencana di wilayah pesisir.

Secara teoretis, penelitian ini memadukan kerangka pemikiran fikih *siyasah* dengan teori tata kelola pemerintahan (*governance*) dan teori implementasi kebijakan publik.⁸ Pendekatan fikih *siyasah* digunakan untuk menelaah bagaimana prinsip-prinsip masalahat, syura, dan keadilan dioperasionalkan dalam praktik kebijakan publik di tingkat daerah, serta bagaimana legitimasi kebijakan dapat diperkuat melalui partisipasi masyarakat dan akuntabilitas institusional.⁹

Dari sisi empiris, berbagai literatur menunjukkan bahwa kapabilitas kelembagaan, koordinasi antarinstansi, ketersediaan anggaran, serta keterlibatan publik merupakan faktor-faktor utama yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan penanggulangan bencana di berbagai wilayah. Sejumlah penelitian terdahulu juga mengidentifikasi bahwa hambatan implementasi umumnya berkaitan dengan minimnya sosialisasi kebijakan, kurangnya evaluasi berkelanjutan, serta pengaruh dinamika politik lokal terhadap alokasi sumber daya dan tingkat kepatuhan terhadap peraturan daerah.

Kajian mengenai penanggulangan bencana di kawasan pesisir turut menekankan pentingnya sinergi antar pemangku kepentingan, pelibatan aktif masyarakat, serta penerapan mekanisme evaluasi berbasis data dalam menentukan prioritas penanganan dan rehabilitasi pascabencana.¹⁰ Dengan mengintegrasikan berbagai temuan tersebut, penelitian ini berupaya membangun kerangka analisis yang kontekstual dan aplikatif bagi wilayah Kabupaten Indramayu dan Desa Eretan Wetan, sekaligus memperlihatkan bagaimana nilai-nilai fikih *siyasah* dapat memberikan kontribusi terhadap pembentukan

⁸ Alwi, *Governance Dan Kebijakan Publik*, ed. Bagus Sabrang, 1st ed. (Makasar: UPT Unhas Press, 2022), 45-48

⁹ Roidatus Shofiyah et al., "Fikih *Siyasah* Prinsip-Prinsip Fikih *Siyasah* Dalam Konstitusi Republik Indonesia," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 11, no. 1 (2024): 84–93.

¹⁰ Hendra Gunawan, "Analisis Peran Masyarakat Pesisir Terhadap Ketahanan Pasca Bencana Alam Di Desa Pesisir," *Jurnal Kelautan Dan Perikanan Terapan (JKPT)* 1 (2023): 47.

tata kelola kebijakan publik yang lebih responsif, inklusif, dan berkeadilan. Landasan teoritis berfungsi untuk membangun kerangka berpikir, sedangkan hasil penelitian sebelumnya membantu memperkuat argumentasi dan menunjukkan posisi penelitian ini dalam konteks keilmuan yang lebih luas. Di sini penting untuk menunjukkan adanya celah atau kekosongan penelitian yang akan diisi.

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan dan tinjauan literatur, penelitian ini menawarkan sejumlah rekomendasi kebijakan yang bertujuan untuk memperkuat implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 baik pada tingkat kabupaten maupun desa. Rekomendasi tersebut mencakup upaya peningkatan koordinasi antar perangkat daerah melalui pembentukan mekanisme koordinasi lintas sektor yang terukur dan berkelanjutan, optimalisasi alokasi anggaran yang berfokus pada kegiatan mitigasi banjir rob, serta penguatan peran desa dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Seluruh langkah tersebut diusulkan dengan menekankan pentingnya integrasi nilai-nilai fikih *siyasah* sebagai landasan etis dalam tata kelola kebijakan publik.

Selain itu, solusi praktis yang diajukan mencakup pengembangan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan BPBD dan pemerintah desa melalui pelatihan kesiapsiagaan bencana, sosialisasi rutin terhadap Peraturan Daerah, serta pemanfaatan data kebencanaan berbasis teknologi guna meningkatkan akurasi dalam penentuan prioritas alokasi bantuan dan logistik. Dalam kerangka fikih *siyasah*, rekomendasi penelitian ini menekankan pentingnya penerapan prinsip kemaslahatan umum (*mashlahah 'ammah*) dan musyawarah (*syura*) melalui forum pertemuan masyarakat desa sebagai wadah hasil diskusi untuk membangun tata kelola yang adil, transparan, dan partisipatif. Pendekatan tersebut diharapkan mampu memperkuat legitimasi kebijakan publik serta mewujudkan respons penanggulangan banjir rob yang lebih efektif dan berkeadilan di Desa Eretan Wetan.

B. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, pada subbagian ini akan diuraikan secara sistematis mengenai identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan perumusan masalah. Ketiga komponen ini disusun untuk memperjelas fokus kajian dan batas ruang lingkup penelitian, sehingga pelaksanaan penelitian dapat terarah dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil observasi awal dan kajian dokumen, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan berikut:

- a. Ketidaksepakatan antara Peraturan Daerah implementasinya akibat perbedaan interpretasi yang menimbulkan inefisiensi dan hambatan koordinasi terkait mekanisme pelaksanaan, prioritas aksi, serta pengalokasian anggaran mitigasi banjir rob.
- b. Minimnya pelibatan pemerintah dan masyarakat pesisir dalam upaya kesiapsiagaan, respons, dan pemulihan banjir rob.
- c. Belum optimalnya prinsip *mashlahah* dan syura dalam tata kelola kebijakan publik untuk meningkatkan legitimasi dan keadilan distribusi sumber daya
- d. Terbatasnya anggaran dan kapasitas sumber daya manusia di BPBD serta pemerintah desa menjadi kendala dalam menjalankan program mitigasi banjir rob secara konsisten dan berkelanjutan.

1. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terfokus dan mendalam, maka ruang lingkup kajian akan dibatasi pada hal-hal berikut:

- a. Wilayah kajian dibatasi pada Kabupaten Indramayu, dengan fokus utama pada Desa Eretan Wetan.
- b. Aspek yang dikaji fokus pada implementasi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2016 tentang penanggulangan bencana

- c. Mencakup kemampuan kelembagaan BPBD dan perangkat daerah terkait, pengalokasian anggaran untuk mitigasi banjir rob, pola koordinasi antar sektor, serta tingkat keterlibatan komunitas lokal dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan.
 - d. Penelitian ini tidak mencakup variabel lintas wilayah berskala nasional maupun isu non-bencana seperti pengelolaan sumber daya alam di luar konteks banjir rob.
 - e. Penelitian ini menggunakan metode campuran melalui studi dokumenter, analisis regulasi, observasi lapangan, dan wawancara dengan pemerintah.
2. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini disusun dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan berikut:

- a. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Bencana oleh pemerintah Kabupaten Indramayu dalam menangani banjir rob?
- b. Apa saja kendala yang dihadapi pemerintah Kabupaten Indramayu dalam menerapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 terhadap penanganan banjir rob di Desa Eretan Wetan?
- c. Bagaimana peran pemerintah Desa Eretan Wetan dalam mendukung implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 dalam perspektif fikih *siyasah* ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan tersebut melalui pendekatan ilmiah yang

sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Bencana oleh pemerintah Kabupaten Indramayu dalam menangani banjir rob
2. Untuk menganalisis apa saja kendala yang dihadapi pemerintah Kabupaten Indramayu dalam menerapkan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2016 tersebut terhadap penanganan banjir rob di Desa Eretan Wetan
3. Untuk mengeksplorasi bagaimana peran pemerintah Desa Eretan Wetan dalam mendukung implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 perspektif fikih *siyasah*

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Secara umum, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi hal-hal berikut:

1. Manfaat Teoretis
 - a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur mengenai implementasi kebijakan penanggulangan bencana di tingkat daerah.
 - b. Menjelaskan penerapan prinsip-prinsip fikih *siyasah* seperti *mashlahah*, *syura*, dan *'adl* dalam konteks implementasi peraturan daerah.
 - c. Menjadi referensi bagi pengembangan teori implementasi kebijakan publik dalam studi peraturan daerah.
 - d. Mendorong kajian lanjutan dalam pelaksanaan peraturan daerah dan ranah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
2. Manfaat Praktis

- a. Menjadi bahan pertimbangan untuk pemerintah daerah Kabupaten Indramayu meningkatkan efektivitas Peraturan Daerah memperkuat koordinasi lintas sektor, serta mengoptimalkan alokasi anggaran dan mekanisme *monitoring* kebijakan penanggulangan bencana.
- b. Menjadi bahan bagi pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat serta memperluas peran desa sebagai pelaksana kebijakan publik yang responsif terhadap kebutuhan lokal.
- c. Menjadi sumber pembelajaran Masyarakat umum serta komunitas dalam peningkatan kesigapan bencana, penguatan musyawarah dengan melalui keterlibatan Masyarakat

E. Penelitian Terdahulu

Kajian mengenai implementasi kebijakan penanggulangan bencana di tingkat daerah telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, meskipun dengan fokus dan pendekatan yang berbeda. Namun masih terbatas kajian yang mengaitkan implementasi kebijakan tersebut dengan nilai-nilai fikih *siyasa* sebagai kerangka normatif dalam tata kelola pemerintahan daerah.

Pertama, Thiffaly Awwalyca Yumna (2022) dengan judul “*Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Barat dalam Mitigasi Bencana Gelombang Pasang*”.¹¹ Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi BPBD dalam mengurangi risiko bencana gelombang pasang serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasilnya menunjukkan bahwa strategi mitigasi meliputi sosialisasi kepada masyarakat pesisir, penguatan sistem peringatan dini, dan peningkatan koordinasi antarinstansi,

¹¹ Yumna. T. Awwalyca, *Skripsi* “Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Barat Dalam Mitigasi Bencana Gelombang Pasang” (2022): 21–22.

namun masih menghadapi kendala seperti keterbatasan anggaran, rendahnya partisipasi masyarakat, dan kurangnya SDM kompeten di bidang kebencanaan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada kajian mengenai implementasi menelaah implementasi kebijakan penanggulangan bencana di tingkat daerah dengan fokus pada efektivitas pelaksanaan, koordinasi antarinstansi, serta peran masyarakat pesisir. Keduanya juga memakai pendekatan kualitatif untuk mengungkap kondisi empiris di lapangan. Perbedaannya terletak pada objek pendekatan analisis dengan konsep fikih *siyasa* untuk menilai kebijakan publik berdasarkan nilai-nilai *mashlahah*, *syura*, dan *'adl*.

Kedua, Dede Aldian Firdaus (2022) dengan judul "*Peran Pemerintah Daerah Dalam Implementasi Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Luwu Utara*"¹² bertujuan menganalisis peran pemerintah daerah dalam tahap mitigasi, tanggap darurat, dan rehabilitasi bencana banjir. Menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi, penelitian ini menemukan bahwa pemerintah daerah telah berupaya melalui pembentukan kebijakan, pembinaan masyarakat, serta koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan instansi terkait. Namun, pelaksanaannya masih terkendala oleh keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi lintas sektor, dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana.

Persamaan dengan penelitian ini dan penelitian yang akan berlangsung yaitu dalam menyoroti peran pemerintah daerah, pentingnya koordinasi lintas sektor, dan partisipasi masyarakat sebagai faktor kunci keberhasilan kebijakan. Namun, perbedaannya terletak pada objek dan kedalaman analisis, penelitian Dede Aldian Firdaus meninjau peran pemerintah daerah secara umum di Luwu Utara, sedangkan dalam penelitian ini lebih spesifik pada implementasi Peraturan Daerah No. 3 Tahun

¹² D A Firdaus S, *Skripsi* "Peran Pemerintah Daerah Dalam Implementasi Penanggulangan Bencana Banjir Di Kabupaten Luwu Utara," (Universitas Hasanuddin, 2022). 25-27

2016 di Indramayu serta memperkaya analisisnya dengan dimensi etika dan moral fikih *siyasah* , yang memberikan kontribusi ilmiah baru dalam studi tata kelola kebijakan publik daerah.

Ketiga, Siti Yuhana (2023) berjudul “*Mitigasi Bencana Banjir Rob di Desa Mundu Pesisir, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon*”¹³ bertujuan menganalisis pelaksanaan mitigasi bencana banjir rob di wilayah pesisir Mundu, Cirebon. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, penelitian ini menunjukkan bahwa upaya mitigasi masih belum optimal akibat keterbatasan dana dan minimnya dukungan pemerintah pusat. Program yang dilakukan baru sebatas penanaman mangrove dan sosialisasi kebersihan tanpa dukungan infrastruktur fisik seperti tanggul penahan air laut. Dengan demikian, efektivitas mitigasi banjir rob dinilai masih rendah dan membutuhkan kolaborasi aktif antara pemerintah dan masyarakat.

Persamaan dengan penelitian ini yaitu menelaah peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan kebijakan publik serta menilai efektivitas dan tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat.. Sedangkan Perbedaannya Penelitian Siti Yuhana lebih menitikberatkan pada strategi mitigasi lingkungan dan peran masyarakat di tingkat lokal, tanpa menelaah aspek hukum atau normatif yang melandasinya. Sedangkan penelitian ini lebih komprehensif karena menganalisis implementasi kebijakan formal (Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2016) serta mengaitkannya dengan kerangka teori *governance* dan prinsip fikih *siyasah* .

Keempat, Muhammad Farhan Haikal (2022) berjudul “*Partisipasi Masyarakat dalam Mitigasi Bencana Tanah Longsor di Kecamatan Megamendung, Kabupaten*

¹³ Siti Yuhana, *Skripsi “Mitigasi Bencana Banjir Rob Di Desa Mundu Pesisir, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon,”* (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023). 29-34

Bogor”¹⁴ bertujuan menganalisis tingkat partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Dengan pendekatan kualitatif studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat mencakup empat tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi dengan faktor pendukung berupa keberadaan program *Desa Tangguh Bencana* dan kekompakan warga, sementara kendala utamanya adalah lemahnya komunikasi dan rendahnya kepedulian sosial sebagian masyarakat.

Persamaan dengan penelitian ini yaitu dalam menyoroiti peran masyarakat dan pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana serta menggunakan pendekatan empiris berbasis data lapangan. Namun, Perbedaannya terletak pada objek dan pendekatan analisis. Penelitian Farhan menyoroiti aspek sosial dan partisipatif masyarakat dalam mitigasi tanah longsor, sedangkan penelitian ini mnenyoroiti penanggulan banjir rob yang terjadi di Desa Eretan Wetan dengan fokus pada implementasi kebijakan daerah dengan integrasi nilai-nilai Islam.

Kelima, Muhammad Arrafi Tawakal (2024) berjudul “*Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 dalam Menanggulangi Bencana Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Perspektif Fikih Siyash*”¹⁵ bertujuan untuk menganalisis peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bengkalis dalam penanggulangan bencana dan meninjau pelaksanaannya dari perspektif fikih *siyash*. Menggunakan metode kualitatif lapangan, penelitian ini menemukan bahwa BPBD telah berupaya melaksanakan amanat Undang-

¹⁴ Muhammad Farhan Haikal, *Skripsi* “Partisipasi Masyarakat Dalam Mitigasi Bencana Alam Untuk Mengurangi Risiko Bencana Tanah Longsor Di Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor,” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), 30-33

¹⁵ Muhammad Arrafi Tawakal, *Skripsi* “Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 Dalam Menaggulangi Bencana Menurut Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 Perspektif Fikih *Siyash*” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024). 22-23

Undang No. 24 Tahun 2007, namun masih menghadapi kendala sumber daya, fasilitas, dan kesadaran masyarakat.

Persamaannya yaitu berfokus pada implementasi kebijakan penanggulangan bencana di Tingkat daerah dengan menggunakan perspektif fikih *siyasah*. Sedangkan perbedaan yaitu penelitian Arrafi tawakal menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan penelitian ini menggunakan metode campuran. Kemudian konsep fikih *siyasah* yang digunakan Arrafi Tawakal dengan penekanan pada nilai *amanah* dan *keadilan*. Sedangkan penelitian ini penerapan Fikih *Siyasah* dengan menelaah prinsip *mashlahah*, *syura*, dan *'adl* dalam konteks partisipasi publik di desa pesisir.

F. Kerangka Pemikiran

Permasalahan utama dalam penelitian ini berangkat dari belum optimalnya pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Indramayu, khususnya di Desa Eretan Wetan yang kerap dilanda banjir rob. Meskipun Peraturan Daerah tersebut disusun untuk memperkuat sistem mitigasi, tanggap darurat, serta rehabilitasi pascabencana melalui mekanisme koordinasi antarinstansi dan partisipasi masyarakat, implementasinya di lapangan masih menunjukkan kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dan realitas pelaksanaan (*das sein*). Hambatan seperti lemahnya koordinasi, keterbatasan sumber daya, serta minimnya keterlibatan masyarakat mengindikasikan bahwa tujuan regulasi tersebut belum sepenuhnya tercapai.

Dalam perspektif fikih *siyasah*, kebijakan publik idealnya berlandaskan pada nilai-nilai dasar pemerintahan Islam, yaitu *mashlahah* (kemaslahatan umum), *syura* (musyawarah), dan *'adl* (keadilan). Prinsip *mashlahah* menuntut pemerintah untuk mengutamakan kepentingan publik; *syura* menekankan pentingnya pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan; sedangkan *'adl* menegaskan keadilan dan transparansi dalam distribusi bantuan serta pengelolaan sumber daya. Ketiga nilai

ini menjadi pijakan normatif dan moral bagi terciptanya tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Secara kelembagaan, Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2016 telah mengatur pembagian kewenangan antara pemerintah kabupaten, perangkat daerah seperti BPBD, serta pemerintah desa dalam pelaksanaan penanggulangan bencana. Namun, secara empiris, efektivitas peraturan tersebut masih terbatas akibat lemahnya koordinasi, kurangnya sosialisasi, serta minimnya pengawasan terhadap implementasi di tingkat lokal. Kondisi ini menunjukkan perlunya pendekatan yang tidak hanya administratif, tetapi juga berbasis nilai-nilai fikih *siyasah* agar kebijakan publik memiliki legitimasi moral dan spiritual yang lebih kuat.

Penelitian ini menggunakan teori implementasi dari George C. Edward III untuk menganalisis sejauh mana pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama: komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi.¹⁶ Di samping itu, teori *governance* digunakan untuk menyoroti pentingnya kolaborasi dan koordinasi antara berbagai aktor, termasuk pemerintah daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), pemerintah desa, dan masyarakat. Kedua teori ini kemudian dipadukan dengan konsep fikih *siyasah* sebagai landasan normatif dalam menilai kesesuaian praktik pemerintahan dengan prinsip kemaslahatan, musyawarah, dan keadilan. Dengan mengkaji hubungan antara kebijakan daerah, teori implementasi dan *governance*, serta prinsip-prinsip fikih *siyasah*, penelitian ini diarahkan untuk:

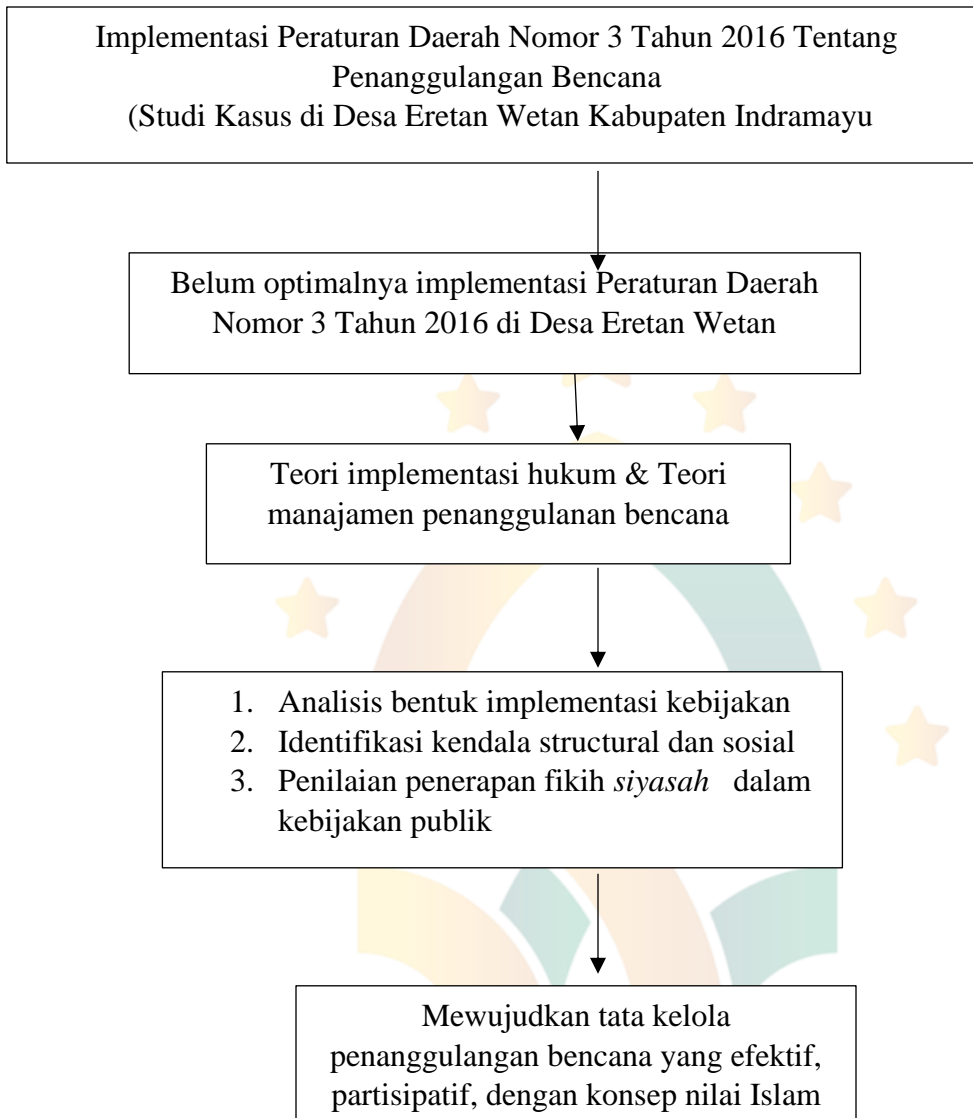
1. Mengidentifikasi bentuk implementasi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2016 di Kabupaten Indramayu;
2. Menganalisis kendala yang dihadapi pemerintah daerah dan desa dalam penanganan banjir rob;

¹⁶Naufalariiq Vadio Samsuddin et al., “Evaluasi Implementasi Kebijakan Program Desa Assessment Di Desa Kepuhkiriman Kecamatan,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 10, no. 3 (2024): 36–46.

3. Menilai sejauh mana nilai-nilai fikih *siyasah* diterapkan dalam praktik pemerintahan lokal; dan
4. Merumuskan rekomendasi strategis untuk memperkuat tata kelola penanggulangan bencana yang responsif, partisipatif, dan berkeadilan.

Untuk memberikan gambaran yang lebih sistematis, kerangka pemikiran di atas dapat divisualisasikan dalam bentuk skema alur pemikiran berikut ini:





UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

G. Metode Penelitian

Untuk memudahkan dalam memahami dan menganalisis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, penulis akan menguraikan secara sistematis beberapa komponen utama dalam metode penelitian. Uraian ini mencakup: (1) Pendekatan Penelitian, (2) Jenis Penelitian, (3) Sumber Data Penelitian, (4) Teknik Pengumpulan Data, dan (5) Teknik Analisis Data.

Masing-masing komponen dijelaskan untuk menunjukkan kesesuaian antara tujuan penelitian, permasalahan yang dikaji, dan metode yang dipilih. Dengan demikian, keseluruhan proses penelitian dapat berjalan secara terarah, objektif, dan sesuai dengan kaidah ilmiah.

Penelitian ini menggunakan metode dan pendekatan yang dirancang secara tepat untuk mengkaji secara mendalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Bencana di Desa Eretan Wetan, Kabupaten Indramayu.

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif yaitu digunakan untuk menelaah secara mendalam proses implementasi kebijakan, keterlibatan antara pemerintah dan masyarakat, serta berbagai hambatan yang dihadapi oleh pemerintah daerah maupun pemerintah desa.¹⁷

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (*Statute approach*) dan pendekatan sosiologis (*sociological approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk mengkaji aspek normatif kebijakan penanggulangan bencana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016, serta keterkaitannya dengan berbagai regulasi yang menjadi

¹⁷ Ismail Harahap, "Penelitian Gabungan (Mixed Methods Research): Sebuah Pendekatan Komprehensif Dalam Metodologi Penelitian," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9, no. 2 (2025): 84–89, <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/29999/19798>.

dasar hukum penyelenggaraan penanggulangan bencana. Melalui pendekatan ini, penelitian menelaah substansi, hierarki, serta sinkronisasi norma hukum dalam Peraturan Daerah tersebut, sekaligus menilai legitimasi yuridis dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip manajemen penanggulangan bencana.¹⁸

Pendekatan sosiologis (*sociological approach*) diterapkan untuk memahami implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 dalam konteks sosial di lapangan, khususnya pelaksanaannya oleh pemerintah daerah dan desa serta respons masyarakat pesisir yang terdampak banjir rob. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah perilaku kelembagaan, tingkat partisipasi masyarakat, serta faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang memengaruhi efektivitas kebijakan.¹⁹ Dalam hal ini, Desa Eretan Wetan dijadikan studi kasus guna mengkaji dinamika interaksi antara kebijakan pemerintah dan masyarakat lokal, termasuk relevansi penerapan nilai-nilai fikih *siyasah* seperti *mashlahah*, *syura*, dan *'adl* dalam memperkuat legitimasi dan akuntabilitas kebijakan publik di tingkat desa.

3. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yaitu metode yang menelaah penerapan hukum dalam praktik sosial. Fokus kajiannya tidak hanya pada aspek normatif Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Bencana, tetapi juga pada implementasinya oleh pemerintah daerah dan masyarakat Desa Eretan Wetan dalam penanganan banjir rob. Melalui jenis penelitian ini berupaya mengidentifikasi kesenjangan antara hukum yang seharusnya berlaku (*das sollen*) dan kenyataan di lapangan (*das sein*) guna menilai efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah serta mengungkap faktor pendukung dan penghambatnya.

¹⁸ Sidi Ahyar Wiraguna, "Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif Di Indonesia," *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3, no. 3 (2024), 59-63

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, 31st ed. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 21-23

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi lapangan, dan analisis dokumen terkait kebijakan penanggulangan bencana.²⁰

4. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini, data yang digunakan diperoleh dari dua jenis sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung melalui kegiatan wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan penanggulangan banjir rob. Informan tersebut meliputi:

- 1) Pejabat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Indramayu selaku pelaksana utama kebijakan penanggulangan bencana;
- 2) Perangkat Desa Eretan Wetan yang berperan dalam penerapan kebijakan di tingkat lokal;

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder dihimpun dari berbagai sumber tertulis dan dokumen resmi yang relevan dengan fokus penelitian, antara lain:

- 1) Peraturan perundang-undangan,
- 2) Literatur akademik, mencakup buku, jurnal ilmiah, artikel, serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan implementasi kebijakan publik, manajemen bencana, dan fikih *siyasah* .

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa metode yang disesuaikan dengan jenis dan pendekatan penelitian. Adapun teknik yang digunakan yaitu:

a. Observasi

²⁰ Joenadi Efendi and Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, ed. Irfan Fahmi, 2nd ed. (Jakarta: Kencana, 2016), 151-156

Observasi dilakukan secara langsung di lapangan untuk memperoleh data empiris terkait kondisi wilayah Desa Eretan Wetan yang terdampak banjir rob serta langkah-langkah penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat. Melalui observasi ini, peneliti dapat menilai tingkat kesiapsiagaan, efektivitas koordinasi antar pihak, serta bentuk partisipasi masyarakat dalam menghadapi bencana.

b. Wawancara

Metode wawancara dilakukan secara mendalam terhadap informan kunci yang berperan langsung dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang penanggulangan bencana. Informan meliputi pejabat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Indramayu, aparatur Pemerintah Desa Eretan Wetan. Wawancara ini bertujuan menggali informasi mendalam mengenai bentuk pelaksanaan kebijakan, kendala yang dihadapi, serta peran pemerintah desa dalam mendukung upaya penanggulangan bencana.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dilakukan dengan menghimpun berbagai dokumen resmi dan arsip yang relevan dengan pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana. Sumber data meliputi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 dan laporan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

6. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan dukungan data kuantitatif deskriptif untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai implementasi kebijakan penanggulangan bencana, kendala pelaksanaannya, serta peran masyarakat dan pemerintah desa dalam perspektif fikih *siyasa*, yang mencakup tiga tahap:

a. Reduksi Data

Data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi diseleksi, disusun, serta dikelompokkan sesuai fokus penelitian, yakni implementasi Peraturan Daerah, kendala pelaksanaan, dan peran desa dalam perspektif fikih *siyasah* . Informasi yang tidak relevan dihilangkan agar analisis lebih terarah.

b. Penyajian Data

Menyajikan data dalam bentuk uraian deskriptif dan tematik untuk memperjelas pola serta keterkaitan antar unsur yang diteliti.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan ditarik berdasarkan hasil analisis dan diverifikasi melalui perbandingan antara temuan empiris dengan teori fikih *siyasah* , dan implementasi, teori manajemen bencana guna menjamin validitas dan keabsahan hasil penelitian.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan ini disusun untuk memberikan gambaran mengenai struktur dan alur isi skripsi yang terdiri dari Bab I hingga Bab V, dengan uraian sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan Pada Bab ini memuat penjelasan mengenai latar belakang masalah, permasalahan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. Bab ini berfungsi sebagai pengantar awal yang menjelaskan urgensi dan arah dari penelitian.

BAB II, Tinjauan Teoritis pada Bab ini memaparkan implementasi hukum, peraturan daerah, penanggulangan bencana, teori manajemen bencana, dan konsep fikih *siyasah* .

BAB III, Deskripsi Umum Objek Penelitian Bab ini memuat uraian mengenai gambaran umum kabupaten Indramayu khususnya Desa Eretan Wetan. Bab ini

menjelaskan profil desa Eretan Wetan, kondisi kerawanan dan jenis bencana di Desa Eretan Wetan.

BAB IV, Analisis dan Pembahasan bab ini menampilkan temuan empiris mengenai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2016 tentang penanggulangan bencana dalam penanganan banjir rob, kendala yang dihadapi pemerintah Kabupaten Indramayu dalam penerapan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 terhadap penanganan banjir rob di Desa Eretan Wetan, dan peran pemerintah Desa Eretan Wetan dalam mendukung implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 dalam perspektif fikih *siyasah* .

BAB V, Penutup bab ini berisi Kesimpulan dan saran, kesimpulan disusun sebagai jawaban atas rumusan masalah penelitian, sedangkan saran diarahkan kepada pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat sebagai rekomendasi dalam peningkatan efektivitas dan penguatan implementasi kebijakan penanggulangan bencana di masa mendatang.